



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TANJUNGPURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUNG HARTOYO
2. Jabatan : KOORDINATOR PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN GURU SEKOLAH
DASAR
3. NHK : 813851

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.110.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 349 m2/168 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. Tanah Seluas 253 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 10.748 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 109.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 557.965.651

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.787.465.651

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.787.465.651

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.